

# **“Alasan Perancis Mempertahankan Perjanjian Le Touquet 2003: Kerja Sama Bilateral Inggris-Perancis Dalam Mengatasi Fenomena Krisis Migran di Calais”**

**Ruli Elisa Febby**

Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
E-mail: [rulielisafebby96@gmail.com](mailto:rulielisafebby96@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian di bawah ini berfokus pada alasan dibalik keputusan Perancis untuk mempertahankan Perjanjian Le Touquet 2003 dengan Inggris. Melalui teori sekuritisasi, penulis menjelaskan bahwa suatu isu dapat dikonstruksikan negara sebagai ancaman bagi keamanan nasional, sehingga memerlukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi resiko yang ditimbulkan termasuk membentuk perjanjian bilateral. Argumentasi penelitian yang diajukan penulis ialah Perancis mempertahankan Perjanjian Le Touquet 2003 karena diuntungkan dengan skema kerja sama finansial dan informasi yang berguna untuk merealisasikan sekuritisasi Perancis terhadap isu ‘Calais Jungle’. Kemudian, melalui pembahasan-pembahasan yang diuraikan penulis dalam penelitian ini, akan dihasilkan kesimpulan yang mendukung argumentasi penelitian. Pada kesimpulan ditunjukkan bagaimana Perjanjian Le Touquet 2003 sangat dibutuhkan Perancis untuk mencapai kepentingannya dalam mensekuritisasi isu krisis migran di Calais. Dengan demikian, Perancis dapat melindungi wilayah domestiknya dari imigran.

Kata Kunci: Perancis, Inggris, “Calais Jungle”, Krisis Imigran, Perjanjian Bilateral, Perjanjian Le Touquet 2003, Sekuritisasi.

## **ABSTRACT**

The research focuses on the aims of France's decision to keep Le Touquet 2003 Agreement up with the UK. I explicating the phenomena by using the theory of securitization. Theory of securitization assumed that an issue could be constructed by the state as a threat to national security. Regarding to combat the threat, states justify any ways including to form a bilateral agreements. The argument of the research stated by the author, that France maintains Le Touquet 2003 Agreement because it has a beneficial financial and information cooperation schemes in order to implement French securitization on the issue of 'Calais Jungle'. At the conclusion it was shown how the Treaty of Le Touquet 2003 was greatly needed by France to fulfill the interest in securitizing the issue of the migrant crisis in Calais. Thus, France can protect its territory from migrants.

Keywords: France, UK, ‘Calais Jungle’, Migrant Crisis, Bilateral Treaty, Le Touquet Treaty 2003, Securitization.

## **Pendahuluan**

Fenomena konflik di beberapa negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah berdampak pada maraknya migrasi ke negara-negara yang dianggap lebih aman. Dalam melakukan migrasi tersebut, negara-negara Eropa menjadi tempat yang dianggap lebih aman dan dapat menjamin keberlangsungan hidup migran. Fenomena 'Calais Jungle' merupakan bukti nyata adanya krisis migran yang dihadapi negara-negara Eropa. 'Calais Jungle' merupakan krisis imigran yang terletak di kota Calais. Namun, berbeda dengan krisis migran lainnya, mayoritas imigran di Calais bercita-cita menuju ke Inggris untuk mengajukan suaka. Perjalanan ke Inggris ditempuh para imigran dengan menumpang secara gelap pada kontainer-kontainer di pelabuhan dan kereta Eurostar yang menuju ke Inggris (Schuster, 2013:3).

Tingginya minat untuk mengajukan suaka kepada Inggris salah satunya disebabkan oleh persepsi imigran terhadap Inggris sebagai negara peduli terhadap imigran, sehingga lebih mudah untuk mengajukan suaka di negara tersebut (Nula, 2010:48). Selanjutnya, bahasa menjadi faktor pendorong lain atas tingginya animo imigran untuk mengajukan suakanya di Inggris. Mengingat banyaknya imigran yang mampu berbahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Perancis, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menjalani kehidupan di Inggris (Now This World, 2016). Selain itu, para imigran percaya bahwa Inggris merupakan negara terbaik untuk hidup yang ditandai dengan mudahnya memperoleh akses atas pekerjaan dan pendidikan (Financial Times, 2014). Kemudian, banyak dari antara imigran-imigran tersebut yang memiliki keluarga di Inggris juga menjadi faktor lain tingginya minat untuk mengajukan suaka di Inggris (Nulan, 2010:14).

Isu 'Calais Jungle' bermula dari ditutupnya Kamp Sangatte oleh Menteri Dalam Negeri Perancis Nicholas Sarkozy pada tahun 2002 (BBC.com, 2015). Penutupan kamp pengungsi Sangatte dilanjutkan dengan kesepakatan oleh Perancis dan Inggris untuk menyelesaikan isu migran tersebut. Namun upaya tersebut tidak menyebabkan krisis migran ini selesai, sebab setelah penutupan Kamp Sangatte para migran justru berdatangan ke kota Calais dan mendirikan tenda-tenda darurat di hutan sekitar

pelabuhan yang menghubungkan Calais di Perancis dan Dover di Inggris. Migran yang tinggal di 'Calais Jungle' merupakan migran yang mayoritas berasal dari negara-negara dengan instabilitas keamanan karena adanya perang sipil seperti Afganistan, Sudan, Eritrea (Vice News, 2015).

Untuk menanggulangi maraknya migran yang ingin masuk ke wilayah Inggris secara ilegal, Perancis dan Inggris menandatangani perjanjian kerja sama Le Touquet 2003. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini memiliki arti bahwa pemeriksaan imigrasi masuk dan keluar diantara kedua negara dilakukan sebelum seseorang melakukan keberangkatan. Tak hanya itu, sepanjang tahun 2002-2016 Inggris dan Perancis telah memperketat perbatasan negara satu sama lain dengan pembangunan infrastruktur keamanan yang memadai. Namun kerja sama tersebut tidak menyelesaikan permasalahan krisis migran di Calais. Hal ini dibuktikan dengan kembali datangnya migran yang ada di 'Calais Jungle' setelah Perancis melakukan sejumlah pengusiran dan pengerusakan tenda-tenda darurat di area tersebut pada tahun 2009 dan 2014.

Perjanjian tersebut dalam beberapa hal merugikan Perancis, sebab Inggris lebih banyak memberikan kontribusi hanya dari segi peningkatan keamanan di kawasan perbatasan. Kemudian, Perjanjian Le Touquet 2003 memberikan keuntungan bagi Inggris sebab dengan perjanjian tersebut Inggris memiliki keleluasaan untuk mengembalikan migran yang terbukti ilegal ke Perancis. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 Perjanjian Le Touquet 2003:

. "If the States of Arrival refuses admission to persons or if persons decide not to pass through the Frontier Control of the State of Arrival, the authorities of the State of Departure may not refuse to accept back such persons. However, the authorities of States of Departure may take any measures to deal with them in accordance with national law and in a way which does not impose obligation on other State"

(United Kingdom Treaties Online, 2003)

Padahal, upaya yang dilakukan para migran untuk melewati batas negara, mayoritas terjadi dari Perancis ke Inggris dan bukan sebaliknya. Kondisi demikian menjadikan Perancis sebagai lokasi transit bagi para migran yang hendak menerobos perbatasan Perancis dengan Inggris. Meski demikian, kondisi yang semakin buruk di Calais

nyatanya tidak membuat Perancis berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Le Touquet 2003 (Dailymail.co.uk, 2016).

### **Sekuritisasi Sebagai Alasan Perancis Mempertahankan Perjanjian Le Touquet 2003**

Krisis migran di Calais telah ada sejak dekade 1990-an, sehingga bukanlah fenomena baru yang dihadapi Inggris dan Perancis. Reinisch (2015:1-2) berasumsi bahwa dibangunnya terowongan di English Channel pada tahun 1994 berkontribusi mempermudah akses untuk menuju ke Inggris (*via* Dover) dari Calais (Perancis) sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan imigran berdatangan ke Calais. Peningkatan jumlah migran terus meningkat akibat dibentuknya kamp pengungsi di Sangatte pada tahun 1999. Namun semakin banyaknya jumlah imigran berdatangan dan menyelundupkan diri ke English Channel, Perancis sepakat untuk menutup kamp pengungsi Sangatte pada tahun 2002. Namun penutupan tersebut tidak menjadi jalan keluar dari krisis ini, sebab pada imigran kembali berdatangan ke Calais dan membangun tenda-tenda di area sekitar pantai hingga pelabuhan (Volks, 2017:310). Pengurusan oleh otoritas setempat juga telah, namun imigran kembali datang dan membangun tenda-tenda pengungsian baru.

Dengan isu yang semakin kompleks, Perancis merasa perlu melakukan sekuritisasi atas isu imigran di Calais. Sekuritisasi merupakan teori yang dikembangkan dalam Copenhagen School. Buzan dan Waever (2003:491) sebagai pengagas awal teori ini mengungkapkan bahwa sekuritisasi merupakan perilaku suatu negara untuk menjadikan suatu isu sebagai bahaya yang mengancam keamanan nasional sehingga harus ditindaklanjuti dengan segera. Untuk itu, negara dapat menjustifikasi haknya untuk melakukan berbagai cara yang diperlukan (Waever, 1988:1995b dalam Buzan et.al, 1998:21). Dalam sekuritisasi mengenai isu imigrasi, dipersepsikan bahwa imigran menyebabkan kebebasan masyarakat menjadi terganggu (Huysmans, 2006:103). Ancaman yang diakibatkan isu imigrasi dikaitkan dengan mobilisasi imigran dari satu negara ke negara lain, sebagai kegiatan transnasional yang memiliki konsekuensi terhadap identitas nasional serta politik dan keamanan internasional.

Lebih lanjut, Bourbeau (2011:2) mengungkapkan bahwa selain diatur melalui kebijakan domestik, penggunaan perjanjian bilateral ataupun multilateral diperlukan dalam rangka menciptakan regulasi untuk menanggulangi isu imigrasi. Keberadaan perjanjian internasional suatu negara dengan negara lain merupakan salah satu strategi negara melakukan sekuritisasi, sebab melalui perjanjian tersebut tercipta kerja sama negara dengan negara lain yang berkontribusi untuk menjaga keamanan domestik masing-masing negara anggota. Oleh karena itu, Inggris dan Perancis memilih kerja sama bilateral untuk menanggulangi krisis migran di Calais. Sebelum lahirnya perjanjian Le Touquet 2003, Perancis dan Inggris telah menginisiasi Protokol Sangatte pada tahun 1991. Protokol tersebut menyepakati penggunaan *juxtaposed border control* sebagai mekanisme pengawasan, yang memperbolehkan setiap negara anggota untuk meletakkan petugas imigrasinya di teritori perbatasan negara mitra. Mekanisme ini menimbulkan konsekuensi bahwa suatu negara dapat melakukan pemeriksaan dokumen terhadap setiap kendaraan yang menuju negaranya sebelum destinasi dilakukan (Bosworth, 2016).

Transformasi protokol Sangatte 1991 menjadi perjanjian Le Touquet 2003 menyebabkan mekanisme pemeriksaan menjadi lebih ketat dengan menerapkan sistem *juxtaposed* pada pelabuhan masing-masing negara yakni di Calais dan Dover. Penambahan titik pemeriksaan dilakukan sebab imigran tidak hanya menyusup melalui kendaraan yang melewati English Channel namun melakukan penyusupan pada beberapa tempat seperti kontainer-kontainer di pelabuhan serta kereta Eurostar. Pembongkaran yang dilakukan terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan isu 'Calais Jungle'. Lokasi Calais yang strategis sebagai rute menuju ke Inggris, tetap membuat imigran kembali berdatangan (Schuster, 2013:18).

Selain itu, Perancis menganggap bahwa krisis migran di Calais sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini disampaikan oleh presiden Hollande ketika melakukan penutupan 'Calais Jungle' di tahun 2016 (Reuters, 2016) "I also want to restate my determination that the British authorities play their part in the humanitarian effort that France is undertaking and that they continue to do that in the future". Pernyataan di atas menyiratkan harapan Perancis kepada Inggris untuk berperan lebih dalam menanggulangi isu krisis migran di Calais. Dengan melakukan kerja sama,

Perancis dapat memperkuat kontrolnya terhadap imigrasi (Clochard, 2016:1). Bahkan fenomena Brexit tidak membuat Perancis berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Inggris. Dalam sebuah wawancara, Menteri Dalam Negeri Perancis, Bernard Cazeneuve mengatakan bahwa

*“Calling for the border with the English to be opened is not a responsible solution. It would send a signal to people smugglers and would lead migrants to flow to call in far greater numbers. A humanitarian disaster would ensue”.*

(Telegraph, 2015)

Oleh karena itu, mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Inggris akan membebani Perancis untuk mengurus krisis migran di Calais. Apalagi, maraknya migrasi internasional menuju negara-negara Eropa serta tingginya serangan teroris di Perancis dalam beberapa tahun terakhir memperburuk kondisi keamanan nasional Perancis. Keterbatasan Perancis untuk menjaga keamanan domestik dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam Zona Schengen Uni Eropa, sehingga lebih sulit untuk mengontrol mobilitas manusia.

Berkaitan dengan fenomena krisis migran di Calais, pemerintah Perancis mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk sekuritisasi. Sekuritisasi terhadap isu imigrasi dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan imigran, meningkatkan keamanan di perbatasan hingga melakukan deportasi (Ceyhan dan Tsoukala, 2002 dalam Farny, 2016). Hal ini tercermin dalam kebijakan deportasi pada masa pemerintahan Presiden Sarkozy. Pada tahun 2007, Menteri Imigrasi Perancis Eric Besson memastikan pengusiran paksa sejumlah imigran Afganistan di ‘Calais Jungle’ sebagai bentuk pengetatan kebijakan imigrasi (World Socialist Website, 2007). Kebijakan ini merupakan operasi gabungan dengan Inggris yang juga melakukan deportasi terhadap imigran-imigran asal Afganistan. Menanggapi kebijakan Eric Besson, Presiden Sarkozy menilai bahwa pengusiran imigran di Calais memang sepatutnya dilakukan sebab mereka merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia yang dapat mengganggu keamanan Perancis.

Kemudian, Moffette dan Vadasaria menilai bahwa sekuritisasi pada imigran dapat mengarah pada tindakan-tindakan rasisme maupun menjustifikasi perlakuan-

perlakuan tidak manusiawi seperti kebrutalan aparat keamanan dan melakukan pemenjaraan terhadap imigran (2016:295). Kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwajib Perancis merupakan salah satu strategi dalam sekuritisasi isu imigran. Beberapa tindak kekerasan seperti pemukulan kerap terjadi (France24, 2015). Tindak kekerasan oleh pasukan keamanan bertujuan untuk menciptakan situasi yang tidak menyenangkan sehingga mendorong para imigran untuk segera meninggalkan Calais. Dengan justifikasi untuk menjaga keamanan, petugas melakukan tindakan-tindakan koersif seperti razia ke dalam tenda-tenda pengungsian, hingga menyerang imigran dengan peluru karet dan meriam air.

Tak hanya tindak kekerasan, Perancis juga membatasi sumber-sumber kesejahteraan bagi imigran merupakan salah satu cara pemerintah dalam melakukan sekuritisasi. Heisler dan Layton-Henry (1993 dalam Da Silva, 2017) mengatakan bahwa mengambil kebijakan restriktif serta membatasi fasilitas bagi imigran menjadi alasan negara dalam rangka menghindari peningkatan jumlah imigran yang tidak terkontrol. Pembatasan fasilitas bagi imigran dapat dilakukan dengan menutup tenda-tenda pengungsian. Selain itu, pemerintah Perancis juga melarang bantuan-bantuan kemanusiaan untuk masuk ke 'Calais Jungle'. Perancis bahkan mengkriminalisasi NGO yang memberikan bantuan terhadap imigran di Calais. Aktor-aktor non-negara yang melanggar dapat menghadapi konsekuensi seperti interogasi, penangkapan hingga diadili oleh pengadilan negara (Clochard, 2016:1).

Di samping melakukan langkah-langkah diatas, Perancis membentuk *container camps* sebagai tempat tinggal resmi imigran di Calais. Penggusuran dan pembongkaran sebagian tenda di 'Calais Jungle' pada Maret 2016 menyebabkan sebagian imigran di Calais terpaksa berpindah ke *container camps*. Namun, untuk masuk ke dalam kompleks *container camps* tersebut, imigran diharuskan untuk mendaftar secara resmi dengan melakukan *scanning* sidik jari. Mekanisme tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran, apabila *scanning* sidik jari yang dilakukan memiliki implikasi terhadap proses pengajuan suakanya dikemudian hari (Singh et.al. 2016:13-14). Selain itu, kompleks *container camps* dikelilingi oleh pagar pengaman yang tinggi, sehingga menyulitkan imigran untuk melakukan penyelundupan ke English Channel. Pembentukan *container camps* merupakan salah satu bentuk sekuritisasi terhadap

imigran sebab dalam upaya ini migran dipersepsikan sebagai ancaman yang perlu diawasi dan dibatasi pergerakannya (Da Silva, 2017).

Keputusan untuk menutup Calais Jungle pada Oktober 2016 merupakan bentuk sekuritisasi maksimal yang dilakukan Perancis. Penutupan 'Calais Jungle' merupakan bagian dari *border security* Perancis dari ancaman imigran ilegal (Sanyal, 2017:2). Jumlah imigran yang berkali-kali lipat pada tahun 2016 memunculkan kekhawatiran akan semakin banyaknya imigran yang berdatangan ke Calais. Kondisi krisis imigran di Perancis yang kian memburuk bukan menjadi satu-satunya alasan pemerintah Perancis menutup 'Calais Jungle'. Munculnya desakan-desakan dari berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah hingga masyarakat sekitar menjadi faktor lainnya. Walikota Calais, Natacha Bouchart menjadi pihak yang mendesak pemerintah pusat untuk segera menutup 'Calais Jungle'. Menurut Bouchart, keberadaan 'Calais Jungle' merupakan sumber ketidakamanan di Calais (Express.co.uk, 2015). Selain Walikota Calais desakan untuk menutup 'Calais Jungle' juga datang dari pebisnis, petani serta pengemudi truk Perancis melalui aksi penutupan rute jalan tol di English Channel (The Sun, 2016). Kemudian, faktor keamanan menjadi faktor berikutnya yang mendorong penutupan 'Calais Jungle'. Berdasarkan laporan dari CRS Perancis, terdapat anggota jaringan terorisme yang telah melakukan penyusupan di 'Calais Jungle' (Le Figaro, 2016).

### **Skema Kerja Sama Finansial dan Informasi Dengan Inggris Sebagai Realisasi Sekuritisasi Terhadap Isu 'Calais Jungle'**

Isu terorisme dan gelombang imigrasi merupakan salah satu ancaman keamanan nasional Perancis yang menjadi konsentrasi utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Ancaman terhadap keamanan nasional semakin nyata dengan meningkatnya insiden terorisme dari tahun ke tahun. Serangan-serangan teroris di Perancis menjadikan Perancis sebagai salah satu negara di Eropa yang menjadi target utama terorisme (Time, 2016). Menurut data yang dikeluarkan oleh Global Terrorism Index (2017:10), Perancis menempati peringkat ke-23 sebagai negara yang ditargetkan kelompok terorisme, dengan mencapai angka 5.964 pada skala 10. Dengan urutan tersebut, Perancis merupakan negara kedua di Eropa setelah Ukraina yang terkena



dampak dari insiden terorisme dan peringkat pertama sebagai negara non-konflik yang terkena dampak terorisme (Global Terrorism Index, 2017:35).

Sementara itu pada isu imigrasi, terjadi peningkatan jumlah imigran yang ingin mengajukan suakanya ke Perancis. Dari angka 41.840 pada tahun 2008, jumlah pengajuan suaka ke Perancis mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Terbukti pada tahun 2009, terdapat 47.620 aplikasi suaka yang masuk ke Perancis, sementara pada tahun 2010 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 52.725. Begitu pula pada tahun-tahun setelahnya, peningkatan kembali terjadi. Memasuki tahun 2015, terdapat sekitar 70.570 imigran yang mengajukan suakanya ke Perancis. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2014 yang hanya mencapai 58.845 aplikasi suaka (Eurostat, 2016). Banyaknya aplikasi suaka yang masuk ke Perancis pada tahun 2017, membuat Perancis berada di urutan ketiga setelah Jerman dan Italia, sebagai negara anggota Uni Eropa yang menjadi destinasi para imigran untuk mencari suaka (Eurostat 2017b).

Kondisi tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Perancis, dengan menganggap bahwa imigran masuk secara ilegal ke teritori Perancis dan menjadi sumber masalah-masalah tertentu seperti meningkatnya pengangguran, penyebaran penyakit, serta masalah lainnya (Kaya, 2012:405 dalam Sweet, 2015:51). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sputnik News kepada 1499 responden, 64% masyarakat Perancis setuju bahwa imigran-imigran dari Afrika dan Timur Tengah yang datang ke Perancis berkontribusi meningkatkan tingkat kriminalitas di Perancis (Sputnik Polls, 2016). Kemudian sebanyak 28% menjawab tidak dan 8% sisanya menjawab tidak tahu. Persepsi yang buruk terhadap imigran juga berlaku bagi imigran di Calais. Sebagai krisis migran terbesar di Perancis, isu 'Calais Jungle' memperoleh perhatian utama khususnya setelah insiden terorisme marak terjadi di Perancis. Kekhawatiran-kekhawatiran terhadap isu terorisme muncul ketika mengkaitkannya dengan kondisi perbatasan negara (Beddiar.et.al, 2017:33).

Berkaitan dengan persepsi buruk tersebut, kondisi keamanan di Calais memang semakin memburuk akibat tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan imigran. Beberapa kerusakan telah terjadi, baik antar sesama imigran maupun antara imigran

dengan otoritas keamanan. Kerusakan pertama terjadi pada tahun 2001, ketika sekelompok migran menyerbu dan menerobos gerbang untuk dapat masuk ke terowongan English Channel (Reinisch, 2015:1). Agar dapat menerobos masuk dan menyelundupkan diri pada kendaraan yang lewat, imigran-imigran di Calais melakukan pengerusakan terhadap infrastruktur keamanan. Selain melakukan pengerusakan, para imigran juga melakukan sejumlah penyerangan terhadap kendaraan yang hendak melintas di English Channel menuju ke Dover-Inggris. Beberapa diantara imigran bahkan dilengkapi dengan senjata tajam. Selain melakukan penyerangan terhadap kendaraan di English Channel, imigran di Calais juga menyerang sejumlah jurnalis yang meliput isu 'Calais Jungle'. Interpreter media SkyNews menjadi salah satu korban kekerasan seksual dalam proses pengambilan liputan di 'Calais Jungle' (Dailymail, 2016). Pada insiden tersebut, imigran lainnya juga menyerang jurnalis SkyNews dengan menggunakan senjata tajam, bebatuan dan mencuri kamera yang digunakan untuk meliput berita.

Atas kondisi ketidakamanan di Calais, Perancis tentu memerlukan kerja sama dengan Inggris. Melalui Perjanjian Le Touquet 2003, Perancis memperoleh keuntungan atas skema *juxtaposed border control*. Tak hanya berfungsi sebagai pintu pengawasan, perbatasan sebuah negara juga memiliki peran penting sebagai *bridge* untuk mengakomodasi kepentingan aktor negara dan non-negara (O'Dowd, 2002:25). Upaya-upaya menjaga perbatasan negara dilakukan dengan sejumlah kegiatan, salah satunya ialah bekerja sama dengan negara tetangga. Dalam menanggulangi isu krisis migran di Calais, Perancis bekerja sama dengan Inggris yang merupakan mitra strategis Perancis terutama dalam bidang keamanan (Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis, 2018).

Kerja sama dengan Inggris yang dibentuk dalam Perjanjian Le Touquet 2003 menghasilkan *juxtaposed border control*. *Juxtaposed border control* memiliki mekanisme kontrol imigrasi yang berbeda. Prosedur yang terjadi pada sistem imigrasi pada umumnya ialah negara *departure* akan memeriksa kelengkapan dokumen imigrasi keluar bagi individu yang hendak meninggalkan negara tersebut, sementara imigrasi masuk baru akan terjadi ketika individu sampai di negara tujuan. Namun prosedur demikian tidak terjadi pada *juxtaposed border control*, dimana pemeriksaan dokumen imigrasi keluar oleh negara *departure* dan pemeriksaan dokumen imigrasi masuk oleh

negara tujuan akan dilakukan sebelum seseorang melakukan keberangkatan. Mekanisme ini secara efektif mencegah pihak-pihak yang ingin masuk ke dalam teritori sebuah negara secara ilegal maupun mengurangi tingkat kegiatan kriminal seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan terorisme. Petugas imigrasi Perancis di Dover berhasil menangkap imigran ilegal yang menyusup pada kendaraan yang hendak menuju ke Perancis (Dailymail.co.uk, 2008).

Selain itu, *juxtaposed border control* dilakukan sebagai bentuk kolaborasi negara-negara yang bertujuan tak hanya untuk mencegah masuknya imigran ilegal ke suatu negara melainkan juga digunakan untuk mencegah imigran melakukan permohonan suaka (Clayton, 2010:397). Upaya negara dalam mengurangi suaka diperkuat oleh pasal 9 Perjanjian Le Touquet 2003 ditetapkan bahwa:

- (1) Where a person makes an asylum claim, or claims any other form of protection provided for under international law or under the national law of the State of Departure, during the control carried out in the State of Departure by the responsible officers of the State of Arrival, this application shall be examined by the authorities of the State of Departure in accordance with its national procedures.
- (2) The same provision shall be applicable when the application is made after the completion of the formalities of the control and before the departure of the vessel. In the event that such an application is made after the departure of the vessel, it shall be dealt with by the State of Arrival, in accordance with its national law.

(United Kingdom Treaties Online, 2003)

Mekanisme tersebut tidak menciptakan ketentuan yang jelas mengenai klaim suaka sesuai dengan Regulasi Dublin<sup>1</sup>. Oleh karena itu, ketika seorang imigran yang memiliki keluarga di Inggris mengklaim suakanya di Perancis, ia diharuskan menunggu otoritas Perancis untuk melakukan transfer klaim suaka ke Inggris serta menunggu keputusan Inggris untuk menerima tanggung jawabnya dibawah ketentuan Regulasi Dublin. Padahal dalam Regulasi Dublin dijelaskan bahwa ketika seseorang mengklaim suakanya di negara tempat anggota keluarganya telah memperoleh suaka, maka negara tersebut

---

<sup>1</sup> Regulasi Dublin merupakan sistematika yang diciptakan negara-negara Eropa untuk menentukan negara anggota yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan permohonan suaka (European Commission, t.t).

bertanggung jawab memeriksa aplikasi suaka yang diajukan (Council Regulation, 2003 t.t dalam Clayton, 2010:417).

Selain menciptakan ambiguitas mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menerima suaka para imigran tersebut, melalui kerja samanya dengan Inggris, Perancis dapat mengalihkan tanggung jawab untuk menerima suaka imigran dengan menekankan bahwa imigran-imigran yang terdapat di Calais tidak ingin mengajukan suakanya di Perancis. Dengan demikian Perancis dapat berdalih bahwa imigran tersebut tidak seharusnya berada di Perancis apabila tidak ingin melakukan pengajuan suaka di negara tersebut (Nulan, 2010:15). Sikap Perancis tersebut merupakan hak negara untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menentukan siapa yang diijinkan masuk dan tinggal dalam teritorinya (Joppke, 1998; Schindlmayr, 2003 dalam Nulan, 2010:15).

Tabel 3.1: Jumlah bantuan finansial oleh Inggris 2009-2016

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Jumlah</b>
2009	Evian Summit	Realisasi program repatriasi, pembangunan pagar besi, alat pelacak barang dan kendaraan	£15 juta (untuk tahun 2009)
2014	Anglo-French Ministerial Declaration	Penambahan pembangunan pagar besi, penambahan jumlah CCTV dan <i>joint action</i> pelacakan dan penangkapan	£12 juta (untuk tahun 2014-2017)

		kelompok kejahatan terorganisir	
2014	Anglo-French Ministerial Declaration	Pengadaan alat <i>thermodetector</i>	£3 juta (untuk tahun 2014-2017)
2015	Joint Ministerial Declaration on UK-France Cooperation	Memperbaiki kualitas pagar besi, memperbanyak jumlah CCTV, pengadaan alat lacak infra merah dan <i>flood lighting</i> .	£12 juta (untuk tahun 2015-2016)
2016	Amiens Summit	Penambahan infrastruktur dan realisasi program repatriasi	£17 juta (untuk tahun 2017)
2016	Pertemuan Menteri Dalam Negeri Inggris-Perancis	Pembangunan infrastruktur keamanan pasca penutupan Calais Jungle, pembersihan tenda-tenda imigran di Calais, bantuan terhadap imigran anak ( <i>unaccompanied minors</i> )	£36 juta (dalam rangka penutupan Calais Jungle tahun 2016)

(Sumber: UK Government, 2009-2016)

Sejak diratifikasinya perjanjian Le Touquet 2003 oleh kedua negara, Inggris mulai mengeluarkan sejumlah dana demi pembangunan infrastruktur keamanan di Calais. Pagar besi menjadi infrastruktur keamanan yang awalnya diadakan oleh kedua negara. Namun, seiring dengan tingginya jumlah penerobosan yang dilakukan para imigran, kedua negara sepakat melakukan penambahan infrastruktur keamanan. Dalam pertemuan bilateral di Evian-Perancis pada tahun 2009, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menawarkan sejumlah dana sekitar £15 juta untuk memperkuat pengamanan di pelabuhan Calais (Independent.co.uk, 2009). Menteri Dalam Negeri Inggris Alan Johnson menyatakan bahwa selain digunakan untuk memperkuat teknologi keamanan, dana yang diinvestasikan Inggris juga digunakan untuk membantu Perancis dalam mengembalikan imigran ilegal ke negara asal. Pada tahun 2014 pemerintah Inggris kembali mengeluarkan dana dalam kerja samanya bersama Perancis untuk menanggulangi masalah krisis imigran di Calais. Sebanyak £3 juta digunakan untuk pengadaan kamera dengan *thermodetector* yang mampu mendeteksi imigran yang bersembunyi di muatan truk (Reinisch, 2015:3).

Adanya sejumlah infrastruktur keamanan di Calais rupanya tidak menurunkan minat imigran untuk menerobos masuk ke English Channel. Untuk itu pada 20 Agustus 2015, Theresa May selaku Menteri Dalam Negeri Inggris kembali mengeluarkan dana sejumlah £12 juta selama dua tahun (uk.ambafrance, 2015). Kerja sama kedua negara dalam pengadaan dana dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi di Amiens tanggal 3 Maret 2016. Pada pertemuan ini, menteri dalam negeri kedua negara sepakat untuk mengalokasikan £17 juta dalam rangka menanggulangi isu krisis migran (UK Home Affairs Committee, 2016:10). Pengalokasian dana oleh kedua negara merupakan program lanjutan dari bantuan dana yang diberikan Inggris dalam deklarasi bersama 20 Agustus 2015. Terkait dengan penutupan 'Calais Jungle' secara resmi oleh pemerintah Perancis pada akhir tahun 2016, Inggris kembali mengeluarkan dana untuk membantu Perancis melakukan pembongkaran tenda-tenda imigran, meningkatkan keamanan di sekitar 'Calais Jungle' hingga relokasi para imigran. Dalam rangka merealisasikan

program-program tersebut, Inggris sepakat mengeluarkan dana sebesar £36 juta (UK Government, 2016). Dari jumlah dana yang disepakati, sejumlah £2juta akan dialokasikan untuk pembangunan 'The Great Wall of Calais'. Pembangunan dinding tersebut merupakan infrastruktur baru untuk menggantikan penggunaan pagar yang dinilai tidak lagi mampu menahan serangan para imigran untuk menerobos ke jalan tol (Dailymail.co.uk, 2016).

Selain bantuan finansial, Inggris dan Perancis juga melakukan *joint action* dan *joint information*. Pertemuan Presiden Nicolas Sarkozy dengan Perdana Menteri Gordon Brown pada Evian Summit tahun 2009 menghasilkan kesepakatan bahwa keduanya sepakat untuk melakukan pembagian tugas dalam menanggulangi krisis imigran di Calais. Inggris sepakat untuk menjadi penyedia dana dalam rangka membantu Perancis mengadakan repatriasi dan meningkatkan keamanan di Calais. Sementara itu, Perancis menjadi eksekutor dalam program repatriasi imigran untuk dikembalikan ke negara asal secara sukarela (The Guardian, 2009). Program repatriasi sukarela tersebut kemudian dilanjutkan dengan program repatriasi yang bersifat memaksa apabila imigran tetap menolak untuk dikembalikan ke negara asal. Oleh karena itu kedua negara sepakat bahwa kerja sama ini menguntungkan kedua negara, yakni dengan menciptakan skema untuk menghalau masuknya imigran ilegal dari Perancis ke Inggris serta mengembalikan imigran-imigran di Calais ke negara asal (Independent.co.uk, 2009)

Kemudian, Home Affairs Committee Inggris menyebutkan bahwa kerja sama yang dibangun Inggris dan Perancis dalam menanggulangi krisis migran di Calais semakin berkembang. Tidak hanya membangun infrastruktur keamanan, namun terdapat kolaborasi yang dilakukan UK Border Force, *gendarmerie* dan Kepolisian Perancis (UK Home Affairs Committee, 2015). Dengan kolaborasi tersebut, kedua negara bekerja sama untuk mengurangi antrian kendaraan di sepanjang jalan akses ke Dover yang disebabkan oleh pemeriksaan untuk menghindari upaya penyelundupan imigran ke dalam kendaraan. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 2014 oleh pemerintah Perancis dengan menambah jumlah aparat keamanan dan pos-pos polisi di sekitar 'Calais Jungle'. Langkah-langkah untuk berkolaborasi diperlukan sebab upaya untuk melakukan penerobosan oleh para imigran semakin marak terjadi.

Selain bekerjasama memonitori aktivitas para imigran, kedua negara juga bekerjasama mengadakan kampanye bagi para imigran untuk memberikan informasi mengenai kehidupan nyata di Inggris dan Perancis serta prosedur dan hak mereka dalam melakukan pencarian suaka di kedua negara. Kampanye tersebut bertujuan untuk mengurangi minat para migran untuk berdatangan ke Inggris, sehingga diharapkan mampu mengurangi jumlah imigran yang berdatangan ke Calais (UK Home Affairs Committee, 2015:7). Kemudian, aksi bersama kedua negara berlanjut pada deklarasi bersama 20 Agustus 2015. Dalam deklarasi tersebut, Perancis dan Inggris menambahkan jumlah aparat keamanan yang bertugas selama 24 jam untuk mencari imigran-imigran yang menyelundupkan diri (UK-France Government, 2015:2-3).

Kolaborasi aparat keamanan yang dilakukan Inggris dan Perancis berlanjut pada pengamanan wilayah garis pantai. UK Border Force dan Angkatan Laut Perancis juga melakukan patroli untuk menghentikan upaya imigran ilegal yang ingin menuju ke Inggris melalui rute laut (UK Home Affairs Committee, 2016:10). Hal ini dilakukan, mengingat jalur yang ditempuh imigran semakin bervariasi dari hari ke hari akibat prosedur keamanan yang ketat di jalan tol, terowongan maupun pelabuhan feri Calais. Dengan demikian, aparat keamanan kedua negara memiliki wewenang untuk menghentikan, menaiki, dan menahan kapal ataupun perahu serta menangkap imigran yang telah melanggar undang-undang imigrasi.

Sementara itu dalam *joint information* Inggris-Perancis bekerja sama mencari informasi mengenai apa motivasi serta bagaimana metode yang dijalankan para imigran untuk menerobos English Channel. Menteri Dalam Negeri Perancis Bernard Cazeneuve pada tanggal 2 Juli 2015 menegaskan bahwa kerjasama informasi terus diperkuat. Oleh karena itu, tak hanya membangun kolaborasi antara UK Border Force, *gendarmerie* dan kepolisian Perancis, kedua negara juga mengkolaborasikan National Crime Agency (NCA) Inggris dan 'Central Office for Repression of Illegal Immigration and Employment of Untitled Foreigners' (OCRIEST) Perancis. Kolaborasi NCA dan OCRIEST merupakan sarana komunikasi kedua negara dalam melakukan kegiatan intelejen untuk menanggulangi kelompok kriminal terorganisir yang memfasilitasi imigrasi ilegal di sekitar Calais. Melalui kerjasama tersebut, pada tahun 2014 kedua negara telah berhasil melumpuhkan kelompok kejahatan terorganisir dengan



peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya (UK Home Affairs Committee, 2016:7).

Kemudian, untuk menurunkan jumlah imigran yang berdatangan ke Calais, kedua negara kembali menciptakan kampanye sebagai upaya mendorong imigran-imigran tersebut kembali ke negara asalnya. Dalam deklarasi bersama Inggris-Perancis (UK-France Government, 2015:5), kedua negara berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi imigran yang ingin kembali ke negara asalnya melalui fasilitas pengembalian yang didanai kedua negara. Selain itu, Inggris dan Perancis juga bekerja sama dengan Komisi Eropa dan Non Governmental Organization(s) (NGOs) untuk memaksimalkan program tersebut. Upaya mengurangi jumlah imigran tak hanya dilakukan dengan program repatriasi ke negara asal. Perancis dan Inggris sepakat bekerja sama untuk mengimplementasikan Regulasi Dublin III sebagai dasar hukum pengajuan suaka negara-negara Eropa (UK-France Government, 2016:2). Berkaitan dengan aplikasi imigran, Regulasi Dublin III dengan jelas menyatakan bahwa negara anggota tempat imigran melakukan *fingerpint* atau pengajuan suaka, memiliki tanggung jawab penuh untuk memproses pengajuan suaka imigran tersebut (European Commision, t.t). Dengan dasar Regulasi Dublin III, kedua negara dapat melakukan deportasi ke negara pertama yang dicapai imigran tersebut.

## **KESIMPULAN**

Perjanjian Le Touquet 2003 memiliki arti penting bagi Perancis, yakni sebagai bantuan dari Inggris untuk menjaga keamanan domestiknya dari gelombang imigran. Melalui perjanjian ini, Perancis diuntungkan melaluk skema kerja sama finansial dan informasi yang membuatnya dapat berkolaborasi dengan Inggris dalam menghalau masuknya imigran ke wilayah domestik masing-masing negara. Isu imigran merupakan konsentrasi utama bagi keamanan domestik Perancis yang saat ini goyah akibat peningkatan insiden terorisme. Maraknya insiden terorisme yang mayoritas dilakukan oleh imigran menimbulkan persepsi buruk bahwa ketidakamanan yang terjadi di Perancis diciptakan oleh para imigran.

Sebagai salah satu krisis terbesar, 'Calais Jungle' juga menjadi isu yang dianggap menjadi sumber ketidakamanan domestik di Perancis. Sebagai titik terdekat untuk mencapai teritori Inggris, Calais merupakan jalur yang paling banyak dipilih oleh para imigran. Pembangunan infrastruktur di wilayah English Channel menyebabkan akses menuju Inggris semakin mudah, sehingga menambah daya tarik Calais untuk didatangi imigran. Namun, semakin banyaknya jumlah imigran disusul oleh maraknya tindakan kriminal yang dilakukan imigran di wilayah tersebut semakin meyakinkan pemerintah Perancis bahwa diperlukan sejumlah tindakan untuk mengamankan kota tersebut. Dalam merealisasikan sekuritisasi terhadap para imigran, pemerintah Perancis telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi jumlah imigran di Calais, salah satunya yakni menciptakan kondisi kehidupan seburuk mungkin bagi para imigran. Kebijakan-kebijakan demikian juga membuat imigran tidak nyaman berada di negara tersebut, sehingga diharapkan tidak akan banyak imigran yang masuk ke Perancis. Puncak dari sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Perancis yakni pada penutupan secara resmi 'Calais Jungle' pada tahun 2016.

Dalam uraian, penulis menjelaskan bahwa Perjanjian Le Touquet 2003 yang disepakati Inggris dan Perancis merupakan salah satu alat sekuritisasi Perancis dalam menghadapi krisis imigran di Calais. Perancis memilih untuk tetap mempertahankan Perjanjian Le Touquet 2003 karena adanya keuntungan berupa bantuan keamanan dari Inggris serta usaha bersama sebagai bentuk sekuritisasi dalam mengatasi fenomena krisis migran di Calais. Tak hanya diuntungkan secara finansial, skema kerja sama yang melahirkan *juxtaposed border control* serta adanya *joint action* dan *joint information* menjadi keuntungan lain yang diperoleh Perancis dari perjanjian tersebut. Pada saat yang sama, dengan mempertahankan Perjanjian Le Touquet 2003 Perancis dapat mendesak Inggris untuk turut serta berkontribusi dalam menanggulangi isu krisis migran di Calais.

Sementara itu, mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Inggris bukan menjadi pilihan yang baik bagi Perancis, sebab akan semakin banyak migran yang hendak menuju ke Inggris untuk datang ke Calais sebagai lokasi transit. Lokasi Perancis yang berada pada Zona Schengen menjadikan imigran lebih mudah untuk bermobilisasi masuk. Sementara Inggris tidak termasuk dalam Zona Schengen, sehingga akan jauh lebih sulit bagi seseorang agar dapat masuk ke teritori Inggris. Kemudian Inggris memiliki

kebijakan imigrasi yang ketat, sehingga menyeberang ke teritori Inggris tetap menjadi sesuatu yang sulit bagi para imigran meski Perjanjian Le Touquet 2003 ditiadakan. Oleh karenanya, Calais akan tetap menjadi lokasi transit bagi imigran yang ingin menuju ke Inggris. Kondisi demikian akan menambah jumlah imigran dan dikhawatirkan memperburuk keamanan di Calais. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perancis harus bekerja lebih keras dalam menjaga keamanan teritorinya di sebelah utara.

## **Referensi**

- Bourbeau, Phillipe. 2011. "The Securitization of Migration: A Study of Movement and Order". London: Routledge.
- Buzan, Barry, et. al. 1998. "Security: A New Framework of Analysis". London: Lynne Rienner Publisher, Inc., Boulder.
- Clayton, Gina. 2010. "The UK and Extraterritorial Immigration Control: Entry Clearance and Juxtaposed Control", dalam *Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenge*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Huysmans, J. 2006. *The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU*. Routledge.
- Moffette, David dan Shaira Vadasaria. 2016. "Uninhibited violence: race and the securitization of immigration". *Critical Studies on Security*, 4(3), pp. 291-205.
- Nulan, Merij Van. 2010. "'There are no Angels in Calais': The impact of French migration policies on the migrants of Calais".

- Reinisch, Jessica. 2015. "Forever Temporary: Migrant in Calais, Then and Now". The Political Quarterly Publishing Co. Ltd.
- Sanyal, D. 2017. "Calais's "Jungle": Refugees, Biopolitics, and the Arts of Resistance, *Representations* 139(1): 1-33.
- Scholten, Sophie. 2015. "The Privatization of Immigration Control through Carrier Sanctions: The Role of Private Transport Companies in Dutch and British Immigration Control". Leiden: Brill Nijhoff.
- Schuster, Liza. 2003. Asylum Seekers: Sangatte and the Tunnel. *Parliamentary Affairs*, 56 (3), pp. 506-522.
- Singh, Ishita. et.al. 2016. "Humans of Calais: Migration from the Perspective of Migrants". King College London Migration Research Group.
- Sweet, Evan Robert. 2015. "THE SECURITIZATION OF MIGRATION IN FRANCE".
- Volks, Sabine Dorothea. 2017. "Refugee Encampments in Calais: Between Jungle and City".
- Beddiar, Annick. et.al. 2017. "LES FRANÇAIS ET LEURS PERCEPTIONS DE L'IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE L'IDENTITÉ".
- European Commission. T.t. "Country responsible for asylum application (Dublin) ", dalam [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en). [Online] [Diakses pada 16 November 2018].
- Eurostat. 2017a. "Asylum in the EU Member States: 1.2 million first time asylum seekers registered in 2016 (Syrians, Afghans and Iraqis continued to be the top citizenships)", dalam <https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/Eurostat%20Press%20release%20asylum%20applications.pdf>. [Online] [Diakses pada 11 November 2018].
- Global Terrorism Index. 2017. "Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understanding The Impact of Terrorism". Institute for Economics and Peace.

Gouvernement.fr. t.t. “Nationale Gendarmerie”, dalam <https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/>. [Online] [Diakses pada 12 November 2018].

UK.ambafrance. 2015. “Bernard Cazeneuve and Theresa May visit Calais”, dalam <https://uk.ambafrance.org/Bernard-Cazeneuve-and-Theresa-May-visit-Calais>. [Online] [Diakses pada 4 Desember 2018].

UK-France Government. 2015. “MANAGING MIGRATORY FLOWS IN CALAIS: JOINT MINISTERIAL DECLARATION ON UK/FRENCH CO-OPERATION”. [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/455162/Joint\\_declaration\\_20\\_August\\_2015.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455162/Joint_declaration_20_August_2015.pdf). [Online] [Diakses pada 4 Desember 2018].

UK-France Government. 2016. “UK-France Summit 3<sup>rd</sup> March 2016: Annex on Migration”, dalam [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/505175/UKFRS\\_Migration\\_2\\_March.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505175/UKFRS_Migration_2_March.pdf). [Online] [Diakses pada 9 November 2018].

United Kingdom Government. T.t. “Claim Asylum in the UK”, dalam <https://www.gov.uk/claim-asylum>. [Online] [Diakses pada 11 November 2018].

United Kingdom Government. 1999. “Immigration and Asylum Act 1999”, dalam <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/33/section/40>. [Online] [Diakses pada 3 Desember 2018].

United Kingdom Government. 2016. “Speech on Calais”, dalam <https://www.gov.uk/government/speeches/statement-on-calais>. [Online] [Diakses pada 15 Januari 2019].

United Kingdom Home Affairs Committee. 2015. “The work of the Immigration Directorates: Calais: Government Response to the Committee's”, 18<sup>th</sup> Report of Session 2014–2015.

United Kingdom Home Affairs Committee. 2016. “*Migration Crisis*”, 7<sup>th</sup> Report of Session 2016-2017.

United Kingdom Parliament. 2002. “Note of Visit to Calais and Sangatte—Tuesday 25 June 2002”, dalam <https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldselect/ldecom/187/18712.htm>. [Online] [Diakses pada 11 November 2018].

United Kingdom Parliament. 2016. “Calais and the Channel Ports: Juxtaposed Control”, dalam <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/24/2405.htm>. [Online] [Diakses pada 11 Januari 2019].

United Kingdom Treaties Online. 2003. “Le Touquet Agreement 2003”, dalam <http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treatyrecord.htm?tid=8012>. [Online] [Diakses pada 12 Juni 2018].

Bosworth, Mary. 2016. “Juxtaposed Border Controls and Penal Power on the French North Coast”, dalam <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/juxtaposed-border>. [Online] [Diakses pada 29 November 2018].

Da Silva. 2017. “The Borders of Nord-Pas-de-Calais: Camps, Actors and Insecurity”, dalam <https://newinsecurities.org/2017/03/28/the-borders-of-nord-pas-de-calais-camps-actors-and-insecurity/>. [Online] [Diakses pada 24 November 2018].

Farny, Elizabeth. 2016. “Implications of The Securitization of Migration”, dalam <https://www.e-ir.info/2016/01/29/implications-of-the-securitisation-of-migration/>. [Online] [Diakses pada 19 November 2018].

Aljazeera. 2015. “Calais Life Jungle”, dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/calais-life-jungle-150729105903658.html>. [Online] [Diakses pada 2 November 2018].

Dailymail.co.uk. 2016a. “France Insist It Wont Scrap The Border Deal with Britain as The PM is Left Reeling by Claims He's Scaremongering After Warning the ‘Calais Jungle’ Camp Could Come to Kent”, dalam <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3438465/France-insists-WON-T-scrap-border-deal-Britain.html>. [Online] [Diakses pada 20 Oktober 2018].

Dailymail.co.uk 2016b. “Female Afghan interpreter working with a TV crew ‘is raped by three armed migrants’”, dalam <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3847368/Female-Afghan-interpreter-working-TV-crew-raped-three-armed-migrants-Jungle-hours-bulldozers-destroy-Calais-camp.html>. [Online] [Diakses pada 25 November 2018].

Dailymail.co.uk. 2016c. “‘We Don’t Want!’, Mayor Leads Hundreds French Villagers Streets Protest Against Arrival of migrants ‘Calais Jungle’”, dalam <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3828511/We-don-t-want-Mayor-leads-hundreds-French-villagers-streets-protest-against-arrival-migrants-Calais-Jungle.html>. [Online] [Diakses pada 17 November 2018].

Dailymail.co.uk. 2016d. “We’ll Close ‘Calais Jungle’: Says France’s President Hollande”, dalam <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3805710/We-ll-close-Calais-Jungle-says-France-s-President-Hollande-sets-plans-9-000-migrants-centres-France.html>

Dailymail.co.uk. 2016e. “Britain Build Great Wall Calais: Taxpayer pay 2 Million for 13ft High One Mile Long Concrete Barrier Migrants Out”, dalam <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3776897/Britain-build-Great-Wall-Calais-Taxpayers-pay-2million-13ft-high-one-mile-long-concrete-barrier-migrants-out.html>. [Online] [Diakses pada 10 Januari 2019].

Express.co.uk. 2015. “France urged to clear Calais of migrants as notorious Jungle camp Doubles in size”, dalam <https://www.express.co.uk/news/uk/613274/Calais-migrant-crisis-France-Hollande-Jungle-camp-Britain-Channel-Tunnel>. [Online] [Diakses pada 7 Januari 2019].

Financial Times. 2014. “Calais Migrant Strive to Reach the UK”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=9sqkLU1AjMo>. [Video].

- France24. 2015. "Migrants describe police brutality in French city of Calais", dalam <https://www.france24.com/en/20150120-calais-france-migrants-denounce-police-brutality-hrw/>. [Online] [Diakses pada 26 November 2018].
- Independent.co.uk. 2009. "Britain Pledges Pound 15m To Tighten Border Controls", dalam <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-pledges-pound15m-to-tighten-border-controls-1734049.html>
- Independent. 2015. "Lorry Drivers in Calais Reveal Frustration at Migrant Crisis: We Need Help", dalam <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/lorry-drivers-in-calais-reveal-frustration-at-migrant-crisis-we-need-help-they-are-aggressive-they-10341155.html>.
- Le Figaro. 2016. "Calais La Jungle Hors de Tout Controle", dalam <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/11/01016-20160811ARTFIG00282-calais-la-jungle-hors-de-tout-controle.php>. [Online] [Diakses pada 9 Januari 2018].
- Now This World. 2016. "Why France Control UK Borders", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=wEC4gVL394Y>. [Video] [Diakses pada 19 November 2018].
- Reuters. 2016. "Hollande confirms Calais migrant camp shutdown, urges UK help", dalam <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hollande-calais-idUSKCN11W0P2>. [Online] [Diakses pada 1 Desember 2018].
- Reuters. 2016. "Hollande says UK must take share of responsibility for Calais minors", dalam <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-france-britain-idUSKCN12T0D9>. [Online] [Diakses pada 21 November 2018].
- RT. 2016. "'Problem with Islam': Tell-all book reveals Hollande's views from migrants to Sarkozy", dalam <https://www.rt.com/news/362614-hollande-book-islam-immigrants/>.
- Sputniknews.com. 2016. "Most French Citizens Consider Migrants Main Factor in Increased Crime Rate", dalam <https://sputniknews.com/infographics/201604261038610454-most->



[french-citizens-consider-migrants-main-factor-in-increased-crime-rate/](#). [Online]  
[Diakses pada 11 November 2018].

Telegraph. 2015. “If Brexit happens, UK won't be able to police French borders to stop migrants, warns France”, dalam [http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11946146/If-Brexit-happens-UK-wont-be-able-to-police-French-borders-to-stop-migrants-warns-France.html](#). [Online] [Diakses pada 30 November 2018].

The Guardian. 2009. “UK and France agree on immigration clampdown”, dalam [https://www.theguardian.com/uk/2009/jul/06/uk-france-calais-immigration-sarkozy](#). [Online] [Diakses pada 1 Desember 2018].

The Sun. 2016. “Hundreds of vehicles have blocked entrances to the channel and port blocking traffic in and out of the coastal city”, dalam [https://www.thesun.co.uk/news/1727264/misery-for-brit-holidaymakers-as-70-french-lorries-and-tractors-begin-calais-blockade-against-attacks-by-jungle-migrants/](#). [Online] [Diakses pada 9 Januari 2018].

Time. 2016. “Nice Attack in France by Jihadists Terrorism”, dalam [http://time.com/4407810/nice-attack-france-target-jihadists-terrorism/](#). [Online] [Diakses pada 2 November 2018].

Vice News. 2015. “Migrant Crisis in Calais: Britain's Border War (Dispatch 1)”, dalam [https://www.youtube.com/watch?v=4APllZaY4y4](#). [Video].

World Socialist Website. 2009. “France: Sarkozy Escalates Anti-migrant Campaign”, dalam [https://www.wsws.org/en/articles/2009/10/fran-o31.html](#). [Online][Diakses pada 18 November 2018].